

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Legitimasi

Teori legitimasi menegaskan bahwa perusahaan terus berupaya untuk memastikan bahwa mereka beroperasi dalam bingkai dan norma yang ada dalam masyarakat atau lingkungan dimana perusahaan berada, dimana mereka berusaha untuk memastikan bahwa aktifitas mereka (perusahaan) diterima oleh pihak luar sebagai suatu yang sah. Teori legitimasi sebagai gagasan bahwa agar suatu organisasi untuk terus beroperasi dengan sukses, organisasi harus bertindak dengan cara yang diterima masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut, perusahaan secara berkelanjutan harus memastikan apakah dalam beroperasi perusahaan telah mentaati norma-norma yang dijunjung oleh masyarakat atau dengan kata lain beroperasinya perusahaan sesuai dengan izin masyarakat.

Dasar pemikiran teori ini adalah organisasi atau perusahaan akan terus berlanjut keberadaannya jika masyarakat menyadari bahwa organisasi beroperasi untuk sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai masyarakat itu sendiri. Teori legitimasi menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat, (Siregar,2013). Saat aktivitas perusahaan mulai berbeda dengan keinginan masyarakat, perusahaan harus cepat menyesuaikan kembali. Cara yang dapat dilakukan perusahaan adalah dengan melakukan pengungkapan TBL, karena dengan adanya pengungkapan TBL ini, bilamana masyarakat menemukan hal yang tidak sesuai dengan nilai yang dianut, maka masyarakat akan cepat merespon dan perusahaan dapat segera menyesuaikan kembali sesuai keinginan masyarakat.

2.2 Teori Stakeholder

Teori ini menyatakan bahwa kesuksesan dan hidup-matinya suatu perusahaan sangat tergantung pada kemampuannya menyeimbangkan beragam kepentingan dari para *stakeholder* atau pemangku kepentingan (Lako, 2011). Jika perusahaan mampu, maka perusahaan akan meraih dukungan yang berkelanjutan dan

menikmati pertumbuhan pangsa pasar, penjualan, serta laba. Dalam teori *stakeholder* dinyatakan bahwa perusahaan harus bertanggung jawab terhadap semua pihak yang terkena dampak dari kegiatannya. Dengan kata lain, perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemilik saham saja, melainkan juga bertanggung jawab kepada semua *stakeholder* lain yang memiliki andil bagi perusahaan dan juga yang terkena dampak dari operasi perusahaan. Teori *stakeholder* yaitu terdapatnya perluasan tanggung jawab perusahaan dengan dasar pemikiran bahwa pencapaian tujuan perusahaan sangat berhubungan erat dengan pola lingkungan sosial dimana perusahaan berada. Semua *stakeholder* memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai aktivitas perusahaan yang memengaruhi mereka. Berdasarkan asumsi *stakeholder theory*, perusahaan tidak dapat melepaskan diri dengan lingkungan sosial (*social setting*) sekitarnya. Berdasarkan pada argumen yang disampaikan Friedman (1962) yang mengatakan bahwa tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimalkan kemakmuran pemiliknya. Fassin (2008) dalam Yoehana (2013) *Stakeholder* mengacu pada setiap individu atau kelompok yang mempertahankan andil atau kepentingannya di sebuah organisasi sama seperti cara *shareholder* yang memiliki saham/obligasi di organisasi tersebut. Teori *stakeholder* didasarkan pada gagasan bahwa di luar pemegang saham ada beberapa agen yang berkepentingan dalam tindakan dan keputusan perusahaan. Teori ini menekankan untuk mempertimbangkan kepentingan, kebutuhan dan pengaruh dari pihak-pihak yang terkait dengan kebijakan dan kegiatan operasi perusahaan, terutama dalam pengambilan keputusan perusahaan. Perusahaan perlu menjaga legitimasi *stakeholder* serta mendudukkannya dalam kerangka kebijakan dan pengambilan keputusan, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan perusahaan, yaitu usaha dan jaminan *going concern*.

2.3 Konsep *Triple Bottom Line*

Pengungkapan merupakan suatu hal yang dilakukan perusahaan dalam rangka mempermudah para pengguna laporan keuangan dalam melakukan pertimbangan dan pengambilan keputusan. Hal ini diperkuat oleh Subiyantoro dan Hatane (2007) yang menyatakan bahwa salah satu atribut penting dari pengelolaan

perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) adalah keberadaan pengungkapan perusahaan (Corporate Disclosure). Seiring dengan terjadinya pergeseran orientasi di dalam dunia bisnis dari *shareholders* kepada *stakeholders* yang telah menjadi penyebab munculnya isu tanggung jawab sosial perusahaan (Indrawan, 2011), muncul versi baru dari pengungkapan yang dikenalkan oleh John Elkington, yaitu pengungkapan yang berlandaskan pada tiga dasar utama atau disebut juga *triple bottom line*. Tiga dasar utama dalam *triple bottom line*, yaitu ekonomi (*profit*), sosial (*people*), dan lingkungan (*planet*). *Profit* menjelaskan bagaimana kondisi dan kinerja keuangan dari perusahaan. *People* menjelaskan bagaimana perusahaan memerlakukan orang-orang yang berkaitan dengan perusahaan seperti karyawan, konsumen, *supplier*, dan masyarakat sekitar. Sedangkan *planet* menjelaskan aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan lingkungan sekitar. *Profit*, *people*, dan *planet* saling berkaitan dan menjadi dasar untuk terciptanya perusahaan yang berkelanjutan. Adanya faktor *people* dan *planet* menjadi hal yang membedakan antara pengungkapan *Triple Bottom Line* dengan pengungkapan yang sebelumnya hanya berfokus pada kinerja keuangan saja. *Profit* sebelumnya memang sudah dikenal menjadi faktor penting yang diungkapkan perusahaan bagi para *shareholders* melalui catatan atas laporan keuangan. Namun seiring dengan bergesernya orientasi dari *shareholders* ke *stakeholders* dikarenakan perusahaan semakin sadar mereka merupakan bagian dari masyarakat dan lingkungan, maka *people* dan *planet* ikut serta dituntut oleh para *stakeholders* untuk melengkapi pengungkapan ekonomi yang dilakukan perusahaan. Pengungkapan *Triple Bottom Line* inilah yang menjadi jawaban atas tuntutan para *stakeholders* tersebut. Menurut *Australian Capital Territory* (ACT) (2011) *Triple Bottom Line* mempunyai prinsip dan karakteristik sebagai berikut:

1. Ruang lingkup dan fokus yang lebih luas (*broader scope and focus*)

Fokus TBL dalam ruang lingkup pengukuran, pelaporan, dan pengambilan keputusan lebih luas dibandingkan dengan dimensi ekonomi dan keuangan saja, serta mencari penggabungan dimensi sosial dan lingkungan ke dalam kerangka kerja.

2. Transparansi (*transparency*)

Perusahaan berkewajiban untuk transparan dalam hal keputusan dan aktivitas mereka, serta dampaknya, di luar bidang keuangan, khususnya dampak sosial dan lingkungan, harus diungkapkan kepada masyarakat.

3. Akuntabilitas (*accountability*)

Perusahaan harus dapat bertanggung jawab atas sumber daya, yaitu sumber daya manusia dan alam, yang mereka gunakan dalam menyediakan produk ke masyarakat. Pertanggungjawaban ini juga diperluas untuk generasi mendatang berkenaan dengan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan.

4. Perencanaan dan operasi terintegrasi (*integrated planning and operations*)

Dalam mewujudkan ekonomi yang berhasil, lingkungan yang berkualitas, dan sosial yang sejahtera dibutuhkan cerminan dari ketiga dimensi tersebut dalam perencanaan strategis perusahaan, hal tersebut dalam pengaplikasiannya perlu dihubungkan dengan pengambilan keputusan, kebijakan operasional, sistem manajemen, dan proses pelaporan. Kesimpulannya, proses inti perlu dibuat untuk mengetahui dampak multi dimensi dari keputusan dan aktivitas perusahaan.

Pengungkapan *Triple Bottom Line* dapat menjadi cara yang inovatif bagi para eksekutif dan perusahaan untuk menemukan jalan menuju konsep berkelanjutan yang menguntungkan masa depan di era akuntabilitas lingkungan dan sosial (Zu, 2009). Bentuk nyata kegiatan perusahaan yang berdasarkan konsep *triple bottom line* dapat terlihat dalam kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* perusahaan. Selain itu pula dapat terlihat di dalam *sustainability report* yang dibuat oleh perusahaan. Suartana (2010) mengatakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan bukan merupakan alat impresi manajemen semata, tetapi jauh lebih dari itu merupakan investasi jangka panjang perusahaan yang memungkinkan profitabilitas dan keberlanjutan perusahaan.

2.2.1 Indikator *Triple Bottom line*

a. Stakeholder (*Profit*)

Menurut Daniel Start & Ingie Hovland Stakeholder dalam (Kasmawati, 2014) adalah seseorang yang mempunyai sesuatu yang dapat ia peroleh atau akan kehilangan akibat dari sebuah proses perencanaan atau proyek. Dalam banyak siklus, mereka disebut sebagai kelompok kepentingan, dan mereka bisa mempunyai posisi yang kuat dalam menentukan hasil suatu proses politik. Seringkali akan sangat bermanfaat bagi proyek penelitian untuk mengidentifikasi dan menganalisa kebutuhan dan kepedulian berbagai pemangku kepentingan, terutama bila proyek-proyek ini bertujuan mempengaruhi kebijakan.

Para peneliti masalah lingkungan sangat memperhatikan indikasi-indikasi masalah lingkungan lebih dari perhatian mereka terhadap sebab-sebab masalah tersebut, padahal mengetahui sebab merupakan langkah pertama untuk menyelesaikan masalah dengan benar. Ketika ingin mengetahui sebab-sebab masalah, mereka mulai dengan menganggap bahwa hubungan antara manusia dan lingkungan adalah hubungan materi saja. Karena itu di antara mereka ada yang berpendapat bahwa di antara sebab masalah lingkungan adalah peningkatan produksi industri yang tidak disertai peningkatan penanganan akibat negatif dari kemajuan industri dalam lingkungan. Berikut ini indikator-indikator lingkungan:

- a. Sumbangan tunai, produk, pelayanan untuk mendukung aktivitas masyarakat, pendidikan dan seni.
- b. Tenaga kerja paruh waktu (*part-time employment*) dari mahasiswa/ pelajar.
- c. Sebagai sponsor untuk proyek kesehatan masyarakat.
- d. Membantu riset medis.
- e. Sebagai sponsor untuk konferensi pendidikan, seminar, atau pameran seni.
- f. Membiayai program beasiswa.
- g. Membuka fasilitas perusahaan untuk masyarakat.
- h. Mensponsori kampanye nasional.
- i. Mendukung pengembangan industri local.

b. Tenaga kerja (*People*)

Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang siap melakukan pekerjaan, antara lain mereka yang sudah bekerja, mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang bersekolah, dan mereka yang mengurus rumah tangga. Sedangkan menurut pendapat Sumitro Djojohadikusumo dalam (Kasmawati, 2014) mengenai arti tenaga kerja adalah semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja, termasuk mereka yang menganggur meskipun bersedia dan sanggup bekerja dan mereka yang menganggur terpaksa akibat tidak ada kesempatan kerja.

- a. Mengurangi polusi, iritasi, atau resiko dalam lingkungan kerja.
- b. Mempromosikan keselamatan tenaga kerja dan kesehatan fisik atau mental.
- c. Mengungkapkan statistik kecelakaan kerja.
- d. Mentaati peraturan standard kesehatan dan keselamatan kerja.
- e. Menerima penghargaan yang berkaitan dengan keselamatan kerja.
- f. Menetapkan komite keselamatan kerja.
- g. Melaksanakan riset untuk meningkatkan keselamatan kerja.
- h. Mengungkapkan pelayanan kesehatan tenaga kerja.
- i. Perekrutan atau memanfaatkan tenaga kerja wanita/orang cacat.
- j. Mengungkapkan tujuan penggunaan tenaga kerja wanita/orang cacat dalam pekerjaan.
- k. Program untuk kemajuan tenaga kerja wanita/orang cacat.
- l. Pelatihan tenaga kerja melalui program tertentu di tempat kerja.
- m. Memberi bantuan keuangan pada tenaga kerja dalam bidang pendidikan.
- n. Mendirikan suatu pusat pelatihan tenaga kerja.
- o. Mengungkapkn bantuan atau bimbingan untuk tenaga kerja yang dalam proses mengundurkan diri atau yang telah membuat kesalahan.
- p. Mengungkapkan perencanaan kepemilikan rumah karyawan.
- q. Mengungkapkan fasilitas untuk aktivitas rekreasi.
- r. Pengungkapan persentase gaji untuk pensiun.
- s. Mengungkapkan kebijakan penggajian dalam perusahaan .
- t. Mengungkapkan jumlah tenaga kerja dalam perusahaan.
- u. Mengungkapkan tingkatan manajerial yang ada.

- v. Mengungkapkan disposisi staf- di mana staf ditempatkan.
- w. Mengungkapkan jumlah staf, masa kerja dan kelompok usia mereka.
- x. Mengungkapkan statistik tenaga kerja, misalnya penjualan per tenaga kerja.
- y. Mengungkapkan kualifikasi tenaga kerja yang direkrut.
- z. Mengungkapkan rencana kepemilikan saham oleh tenaga kerja.

c. Lingkungan (*Planet*)

Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi

ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan terdiri dari komponen abiotik dan biotik. Komponen abiotik adalah segala yang tidak bernyawa seperti tanah, udara, air, iklim, kelembaban, cahaya, bunyi. Sedangkan komponen biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa seperti tumbuhan, hewan, manusia dan mikro-organisme (virus dan bakteri).

- a. Pengendalian polusi kegiatan operasi, pengeluaran riset dan pengembangan untuk pengurangan polusi.
- b. Pernyataan yang menunjukkan bahwa operasi perusahaan tidak mengakibatkan polusi atau tidak memenuhi kebutuhan hukum dan peraturan polusi.
- c. Pernyataan yang menunjukkan bahwa polusi operasi telah atau akan dikurangi.
- d. Pencegahan atau perbaikan kerusakan lingkungan akibat pengolahan sumber alam, misalnya reklamasi daratan atau reoisasi.
- e. Konservasi sumber alam, misalnya mendaur ulang kaca, besi, minyak, air, dan kertas.
- f. Penggunaan material daur ulang.
- g. Menerima penghargaan berkaitan dengan program lingkungan yang dibuat perusahaan.
- h. Merancang fasilitas yang harmonis dengan lingkungan.

- i. Kontribusi dalam seni yang bertujuan untuk memperindah lingkungan.
- j. Kontribusi dalam pemugaran bangunan sejarah.
- k. Pengolahan limbah.
- l. Mempelajari dampak lingkungan untuk memonitori dampak lingkungan perusahaan.
- m. Perlindungan lingkungan hidup.

2.3 Good Corporate Governance

Corporate governance adalah suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan dalam rangka meningkatkan tingkat efisiensi ekonomis perusahaan. Hal-hal yang diatur dalam *corporate governance* adalah hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. *Good Corporate Governance* (GCG) adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan (FCGI, 2010).

Prinsip-prinsip pokok agar tercipta GCG dalam perusahaan seperti yang tercantum dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) adalah :

1. Transparansi (*Transparency*)
Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh *stakeholder*.
2. Akuntabilitas (*Accountability*)
Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Akuntabilitas merupakan persyaratan yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.
3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. Independensi (*Independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan *stakeholder* lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

KNKG menjelaskan bahwa *corporate governance* merupakan acuan bagi perusahaan dalam rangka:

1. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan.
2. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu dewan komisaris, direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Mendorong pemegang saham, anggota dewan komisaris, dan anggota direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.
5. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.

6. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

Menurut Siswantaya (2007) sasaran utama *good corporate governance* adalah:

1. Secara internal yaitu adanya sistem dan struktur yang menjamin berjalannya fungsi dari organ-organ perusahaan (RUPS, komisaris dan direksi) secara seimbang. Hal ini berkaitan dengan masalah tersebut antara lain, adanya pemenuhan hak-hak pemegang saham secara adil, pengendalian yang efektif oleh dewan komisaris, serta pengelolaan perusahaan yang transparan dan bertanggung jawab oleh direksi.
2. Secara eksternal menyangkut pemenuhan tanggung jawab perusahaan kepada para pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Hal ini terkait dengan bagaimana perusahaan mengakomodasi kepentingan pihak-pihak tersebut termasuk pemenuhan kewajiban perusahaan untuk taat kepada peraturan yang ada.

2.3.1 Independensi Dewan Komisaris

Menurut Pasal 1 angka 6 UUPT, dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Komisaris independen merupakan pihak yang tidak mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta dengan perusahaan itu sendiri (KNKG). Keberadaan komisaris independen diatur dalam peraturan BAPEPAM No: KEP-315/BEJ/06-2000 yang disempurnakan dengan surat keputusan No: KEP-339/BEJ/072001 yang menyatakan bahwa setiap perusahaan publik harus membentuk komisaris independen yang anggotanya paling sedikit 30% dari jumlah keseluruhan anggota dewan komisaris. Adanya dewan komisaris independen akan membuat kinerja dewan komisaris dalam melakukan pengawasan akan lebih efektif.

2.3.2 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pihak-pihak yang berbentuk institusi seperti yayasan, bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dana pensiun, dan institusi lainnya (Tamba, 2011). Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar untuk menghalangi perilaku *opportunistic* manajer (Rustiarini, 2011). Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme pengawasan yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan kecurangan yang dilakukan oleh manajer.

2.3.3 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan yang diukur dengan presentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen. Pihak tersebut adalah mereka yang duduk di dewan komisaris dan dewan direksi perusahaan. Adanya kepemilikan saham oleh pihak manajemen akan menimbulkan suatu pengawasan terhadap kebijakan – kebijakan yang diambil oleh manajemen perusahaan. Kepemilikan manajerial juga dapat diartikan sebagai persentase saham yang dimiliki oleh manajer dan direktur perusahaan pada akhir tahun untuk masing – masing periode pengamatan. Pendekatan keagenan menggapstruktur kepemilikan manajerial sebagai suatu instrumen atau alat yang digunakan untuk mengurangi konflik keagenan terhadap sebuah perusahaan. Peningkatan kepentingan manajerial digunakan sebagai cara untuk mengurangi konflik keagenan.

2.3.4 Kualitas Audit

Dalam menegakkan prinsip GCG keterlibatan akuntan eksternal yang menjalankan fungsi sebagai auditor memainkan peranan yang penting karena auditor bertugas memverifikasi kewajaran berbagai informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Perusahaan yang diaudit oleh KAP The Big Four memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP non The Big Four (Sandy dan Lukviarman, 2015). Sebab,

ketika reputasi auditor dikatakan baik seperti Big Four, auditor tersebut cenderung menghasilkan kualitas audit yang baik pula agar reputasi merka tetap baik (Herusetya, 2009) diukur dengan menggunakan variabel dummy, dimana katagori 1 untuk perusahaan yang merupakan klien KAP the big four dan angka 0 untuk perusahaan yang bukan klien KAP the big four (Sandy dan Lukviarman, 2015)

Tabel 2.1
KAP di Indonesia yang berafiliasi dengan KAP Big Four

KAP Big Four	KAP di Indonesia	Alamat
Pricewaterhouse Copers (PWC)	KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan	Plaza 89 Jl.H.R. Rasuna Said Kav. X-7 No.6 Jakarta 12940 Indonesia P.O Box 2473 JKP 10001 Telp. +62215212901 Fax : +62215290555/52905050
Deloitte	KAP Osman Bing Satrio	The Plaza Office Tower Lt. 32 Jl. M.H Thamrin Kav 28-30 Jakarta – Indonesia, Telp. : +622129923100
Ernst & Young	KAP Purwanto Suherman & Surja	Tower 2 Gedung Bursa Efek Indonesia, Lt.7 Jl.Jend Sudirman Kav.5253 Jakarta 12190 Indonesia Telp. +622152895000
Klunveld, Peat, Marwick, Goerdeler (KPMG)	KAP Sidharta dan Widjaja	Lt 33 Wisma GKBI 28, Jl, Jend. Sudirman Jakarta 10210 Indonesia Telp +62215742333

Sumber : Agus Ardiana, 2015

2.3.5 Umur Perusahaan

Menurut Nugroho (2012) dalam Kusnia (2013) mendefinisikan umur perusahaan sebagai awal perusahaan melakukan aktivitas operasional hingga dapat mempertahankan *going concern* perusahaan tersebut atau mempertahankan eksistensi dalam dunia bisnis. Hal ini selaras dengan penelitian Widiastuti (2002)

dalam Nofandrilla (2008) yang menyatakan bahwa umur perusahaan dapat menunjukkan bahwa perusahaan tetap eksis dan mampu bersaing.

Umur perusahaan akan mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan bisnisnya dan terus melakukan aktivitas operasi. Berkaitan dengan teori legitimasi akan adanya kontrak sosial dengan masyarakat, maka perusahaan yang berumur lebih panjang berarti telah mampu mengikuti apa yang berlaku di dalam masyarakat. Raharja (2010) ada tiga tahapan dalam siklus perusahaan, *growing ages* atau pertumbuhan, *coming of age* yang meliputi kedewasaan dan masa puncak, dan *aging organizations* atau masa penurunan. Semakin lama umur akan berbanding lurus dengan tingkat *maturity* suatu perusahaan. Dengan umur yang lebih lama perusahaan akan lebih *mature* dan mempunyai lebih banyak pengalaman dalam mengungkapkan informasi dibandingkan dengan perusahaan yang lebih sedikit umurnya.

2.3.6 Ukuran Perusahaan

Ukuran suatu perusahaan dapat memengaruhi luas pengungkapan informasi perusahaan. Secara umum perusahaan besar akan mengungkapkan informasi lebih banyak daripada perusahaan kecil (Adhipradana, 2013). Hal ini dikarenakan perusahaan besar umumnya mempunyai sumber daya yang lebih besar dan *modern* dibandingkan perusahaan kecil. Perusahaan besar dengan sumber daya yang dimilikinya mempunyai biaya informasi yang rendah, kompleksitas dan dasar kepemilikan yang lebih luas dibanding perusahaan kecil sehingga perusahaan besar cenderung mengungkapkan informasi yang lebih luas (Suryono dan Prastiwi, 2011). Longenecker (2001) mengemukakan bahwa terdapat banyak cara untuk mendefinisikan ukuran perusahaan, yaitu dengan menggunakan berbagai kriteria, seperti jumlah karyawan, volume penjualan, dan nilai aktiva atau aset.

Aset adalah manfaat ekonomi dimasa depan yang mungkin diperoleh di masa depan, atau dikendalikan oleh perusahaan tertentu sebagai hasil transaksi atau kejadian masa lalu (Kieso, et al.,2008). Total aset adalah keseluruhan aset yang dimiliki perusahaan. Besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai *equity*,

nilai penjualan atau nilai aktiva (Riyanto, 2008). Sehingga total aset yang dimiliki perusahaan akan mencerminkan besarnya perusahaan.

2.3.7 Jenis Industri

Terdapat banyak jenis perusahaan yang beragam. Sehingga dalam operasinya dapat dibedakan menjadi perusahaan yang secara langsung mempunyai dampak operasi perusahaan terhadap masyarakat. Tentunya bahkan berbeda perlakuannya terutama peranannya dalam operasional perusahaan, karena jenis ini sangat sensitif terhadap lingkungan sosial. Jenis industri menurut hubungannya dengan lingkungan ekonomi, sosial, dan lingkungan masyarakat dapat dibedakan dalam kategori *high profil* dan *low profil*. Perusahaan berkategori *high profile* pada umumnya merupakan perusahaan yang sering memperoleh sorotan dari masyarakat, karena sensitifitas operasinya memiliki potensi untuk bersinggungan dengan kepentingan luas. Masyarakat umumnya lebih sensitif terhadap jenis industri ini karena kelalaian perusahaan dapat membawa akibat yang fatal bagi masyarakat. Yang termasuk kategori *high profile* adalah perusahaan yang menjalankan bisnisnya dalam bidang industri konstruksi, pertambangan, pertanian, kehutanan, perikanan, kimia, otomotif, barang konsumsi, makanan dan minuman, kertas, farmasi dan plastik. Sedangkan yang termasuk *low profile* adalah perusahaan yang menjalankan bisnisnya dalam bidang tekstil, produk personal dan produk rumah tangga.

Menurut Hackston dan Milne perusahaan yang termasuk dalam kategori *high profile* adalah perusahaan yang memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap lingkungan, resiko politik yang tinggi, atau persaingan yang ketat. Sesuai dengan teori *signaling* yang menyatakan bahwa perusahaan berusaha berbuat yang terbaik demi kepentingan para *stakeholder* dan menjadi daya jual termasuk citra perusahaan yang menjamin *sustainability development* perusahaan. maka dari itu perusahaan harus memperhatikan pengungkapan *triple bottom line*.

2.4 Penelitian Terdahulu

Sebagai acuan dari penelitian mengenai perusahaan yang melakukan pengungkapan *triple bottom line*, dapat diuraikan hasil penelitian terdahulu yang memiliki hasil yang bervariasi. Penelitian terdahulu diuraikan, sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tabel Penelitian

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1	Susanto Ario (2014)	Pengaruh Good Corporate Governance, Umur Perusahaan, dan Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan <i>Triple Bottom Line</i> .	Y: <i>Triple Bottom Line</i> X : <i>Good Corporate Governance</i> Umur Perusahaan, dan Ukuran Perusahaan.	Variabel Independensi Dewan Komisaris, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>triple bottom line</i> , dan variabel lainnya tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>triple bottom line</i> .
2	Nugroho (2013)	Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Struktur Kepemilikan,	Y: <i>Triple Bottom Line</i>	Variabel leverage, jenis industri, ukuran

		Dan Good Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Triple Bottom Line Di Indonesia	X : Karakteristik Perusahaan, Struktur Kepemilikan, dan <i>Good Corporate Governance</i>	dewan komisaris, dan komite audit yang berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>triple bottom line</i> dan variabel lainnya tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>triple bottom line</i> .
3	Ervina (2017)	Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan CSR	Y : Corporate Sosial Responsibility X : Karakteristik Perusahaan	Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR, dan variabel kepemilikan manajemen dan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan

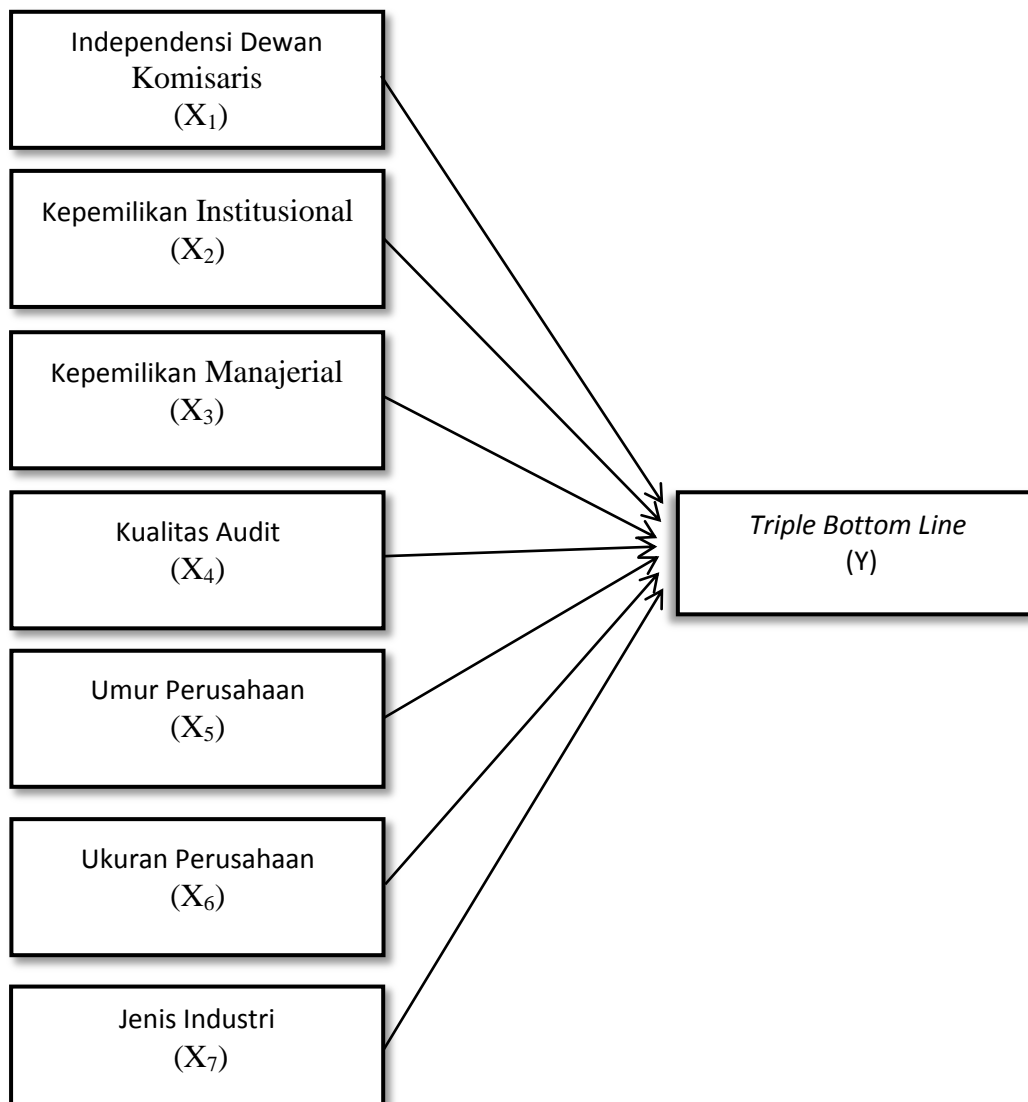
				terhadap pengungkapan.
4	Indah Dewi Utami (2009)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Dewan Komisaris, Kepemilikan Asing, dan Umur Perusahaan Terhadap <i>Corporate Sosial Responsibility Disclosure</i> .	Y : <i>Corporate Sosial Responsibility</i> X : Dewan Komisaris, Kepemilikan Asing, Umur Perusahaan.	Ukuran Perusahaan, Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, Umur Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR dan variabel lainnya tidak berpengaruh.
5	Kasmawati (2014)	Implementasi Akuntansi Lingkungan Berdasarkan Teori <i>Triple Bottom Line</i> Pada Perusahaan-Perusahaan Di Kawasan Industri Makassar.	<i>Triple Bottom Line</i>	Kegiatan Akuntansi / CSR secara umum telah memenuhi konsep/teori TBL yang mencakup <i>Profit, People, dan Planet</i> .
6.	Adhipradana (2013)	Pengaruh Kinerja Keuangan, Perusahaan, dan	Y : <i>Sustainability Report</i> .	Total Aset, Total Karyawan, dan Governance

		<i>Corporate Governance</i> Terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> .	X : Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan.	Committe berpengaruh signifikan dan variabel lainnya tidak berpengaruh.
7	Sandra Aulia (2011)	Analisis Pengungkapan <i>Triple Bottom Line</i> dan Faktor yang Mempengaruhi; Lintas Negara Indonesia dan Jepang	<i>Triple Bottom Line</i>	pengungkapan TBL pada perusahaan Jepang lebih luas dibandingkan dengan di Indonesia,.
8	Fitri Yanti (2015)	Analisis Pengungkapan <i>Triple Bottom Line</i> dan Faktor yang Mempengaruhi; Studi Di Perusahaan Indonesia dan Singapura	<i>Triple Bottom Line</i> X : Leverage, Profitabilitas, Likuiditas, Kepemilikan Asing, Karakteristik negara	Variabel Profitabilitas, Kepemilikan Asing, Karakteristik negara berpengaruh positif pada pengungkapan <i>Triple Bottom Line</i> , sedangkan variabel Leverage, dan Likuiditas tidak berpengaruh pada TBL.

2.5 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terlebih dahulu maka peneliti mengidentifikasi beberapa hal yang akan mempengaruhi *Triple Bottom Line* antara lain, Independensi Dewan Komisaris, Ukuran Komite, umur perusahaan, ukuran perusahaan, dan kinerja lingkungan. Untuk membantu dalam memahami dinamika variabel-variabel di atas, maka diperlukan suatu kerangka pemikiran.

Dari landasan teori yang telah dijelaskan di atas, maka disusun hipotesis yang merupakan alur pemikiran peneliti, kemudian digambarkan dalam kerangka penelitian yang disusun sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.6 Bangunan Hipotesis

2.6.1 Independensi Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan *Triple Bottom Line*

Sandra (2011) menyatakan bahwa dari konsep teori legitimasi, adanya direktur independen dalam komposisi dewan perusahaan dapat memperkuat pandangan publik terhadap legitimasi perusahaan. Masyarakat menganggap dan menilai tinggi suatu perusahaan jika memiliki independen direktur yang seimbang atau banyak dalam dewan perusahaan, karena kondisi seperti ini menandakan lebih efektifnya pengawasan dalam aktivitas manajemen perusahaan.

Sementara itu dalam teori agensi menyatakan bahwa dewan komisaris bertugas melakukan mekanisme untuk mengatasi masalah keagenan yang muncul dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manajemen selaku agen. Karena mungkin fungsi pengawasan dan pemantauan dewan komisaris sangat efektif dilakukan. Hal ini sesuai dengan penelitian Sembiring (2005) menyatakan bahwa adanya bukti signifikan pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan TBL di Indonesia. Berdasarkan penelitian diatas maka hipotesis untuk menguji penelitian ini adalah:

H1 : Independensi dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan *Triple Bottom Line*

2.6.2 Kepemilikan Institusional Terhadap Pengungkapan *Triple Bottom Line*

Rawi (2010) menyatakan bahwa persentase saham institusional menyebabkan tingkat monitor lebih efektif. Oleh karena itu, semakin tinggi kepemilikan institusi, maka untuk program tanggungjawab sosial dan lingkungan semakin luas. Monitor yang ketat yang dilakukan oleh prinsipal dalam hal ini dilakukan untuk meminimalkan biaya agensi yang terjadi. Sehingga pengungkapan *triple bottom line* menjadi lebih luas. Investor konstitusional memiliki kekuatan dan pengalaman serta bertanggungjawab dalam menerapkan konsep *good corporate governance* untuk mengkomodasi hak dan kepentingan seluruh pemegang saham sehingga mereka menuntut perusahaan melakukan komunikasi secara transparan

oleh manajemen. Oleh karena itu, kepemilikan institusional dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pengungkapan *triple bottom line*.

Hal ini berarti kepemilikan institusional dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan pengungkapan *triple bottom line*. Berdasarkan penelitian diatas maka hipotesis untuk menguji penelitian ini adalah:

H2 : Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan *Triple Bottom Line*

2.6.3 Kepemilikan Manajerial Terhadap Pengungkapan *Triple Bottom Line*

Rawi (2010) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat kepemilikan manajemen, semakin tinggi pula untuk melakukan program tanggung jawab sosial perusahaan. Rawi (2010) juga mengatakan bahwa kepemilikan manajemen berpengaruh terhadap pengeluaran program tanggungjawab sosial dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan. Namun pada suatu titik yang mana mengurangi nilai perusahaan dan batasan yang telah dicapai ditemukan hubungan negatif. Hal ini berhubungan dengan kepemilikan saham perusahaan. Akan berbeda jika prinsipalnya adalah orang-orang yang duduk dalam manajemen perusahaan itu sendiri. Bila dihubungkan dengan konsep agensi, jadi prinsipal dan agen menjadi satu pihak yang tidak terpisahkan. Sehingga manajemen cenderung untuk berbuat semauanya sendiri. Oleh karena itu, luas pengungkapan *triple bottom line* pasti rendah. Informasi pengungkapan yang disampaikan juga berbeda bila penerima informasi bukan orang yang menyampaikan informasi tersebut. Berdasarkan penelitian diatas maka hipotesis untuk menguji penelitian ini adalah:

H3 : Kepemilikan manajemen berpengaruh terhadap pengungkapan *Triple Bottom Line*

2.6.4 Kualitas Audit Terhadap Pengungkapan *Triple Bottom Line*

Laporan yang diaudit oleh KAP besar dipercayai akan lebih berkualitas dibandingkan dengan laporan yang diaudit oleh KAP kecil. Laporan yang berkualitas akan menarik minat investor dan juga memenuhi keinginan

stakeholders untuk mendapatkan laporan menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya, tanpa manipulasi dari pihak manajerial. Penelitian Wijaya (2009) dalam Yunita (2009) menunjukkan bahwa KAP besar sudah dikenal masyarakat luas memiliki reputasi yang baik, memiliki sumber daya yang lebih berkualitas dan lebih ahli dalam mengidentifikasi kesalahan akuntansi yang terjadi oleh karena itu dalam melakukan audit mereka akan lebih berhati-hati dan akan mengungkapkan informasi secara lebih luas dan transparan. Penelitian Nuryaman (2008) menyatakan bahwa kualitas audit memiliki pengaruh terhadap pengungkapan sukarela. Hal ini didukung oleh Hapsoro (2012) yang menyatakan ada hubungan dari kualitas audit terhadap pengungkapan sukarela perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H4 : Kualitas audit berpengaruh terhadap pengungkapan *Triple Bottom Line*

2.6.5 Umur Perusahaan Terhadap Pengungkapan *Triple Bottom Line*

Gumanti (2000) menyatakan bahwa perusahaan yang telah lama berdiri, kemungkinan sudah banyak pengalaman yang diperolehnya. Dengan semakin banyak pengalaman yang dimiliki, perusahaan akan lebih mahir dalam mengungkapkan hal-hal yang diinginkan *stakeholders*.

Djoko Sutanto (1992) dalam Yularto dan Chariri (2003) menyatakan semakin panjang umur perusahaan akan memberikan pengungkapan yang lebih luas dibandingkan dengan perusahaan yang lebih pendek umurnya dengan alasan perusahaan tersebut mempunyai pengalaman lebih dalam pengungkapan laporan tahunan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Ansah (2000) yang menyatakan bahwa umur perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *triple bottom line*. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H5 : Umur perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *Triple Bottom Line*

2.6.6 Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan *Triple Bottom Line*

Size atau ukuran perusahaan dapat diartikan suatu skala dimana perusahaan dapat diklasifikasikan besar kecilnya menurut berbagai cara, salah satunya adalah

dengan besar kecilnya aset yang dimiliki. Ukuran perusahaan dapat menentukan besar kecilnya aset yang dimiliki perusahaan, semakin besar aset yang dimiliki semakin meningkat juga jumlah produktifitas. Hal itu akan menghasilkan laba yang semakin meningkat, hal tersebut mempengaruhi pengungkapan. Perusahaan yang termasuk dalam skala perusahaan besar akan mempunyai sumber daya yang berlimpah yang dapat digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aset, semakin besar total aset menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total aset yang kecil (Rachmawati dan Triatmoko, 2007). Secara teoritis, perusahaan besar tidak akan lepas dari tekanan, dan perusahaan besar dengan aktivitas operasi dan pengaruh yang lebih besar terhadap masyarakat mungkin akan memiliki pemegang saham yang memperhatikan program sosial yang dibuat perusahaan sehingga pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan akan semakin luas (Cowen et al., 1987 dalam Sembiring, 2005). Hal ini sejalan dengan Ulum (2009) yang mengatakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin banyak perusahaan akan mengungkapkan informasi di dalam laporan tahunannya. Total aset menjadi salah satu indikator penentu besarnya ukuran perusahaan. Semakin besar aset yang dimiliki perusahaan, maka para stakeholders akan tertarik untuk mengetahui bagaimana dan apa hasil dari pemanfaatan aset tersebut, karena dengan semakin besar aset, maka aktivitas perusahaan akan semakin banyak dan akan berdampak lebih besar pula dalam hal sosial dan lingkungan. Sehingga perusahaan akan berusaha mengungkapkan kinerja mereka seluas - luasnya memenuhi keinginan para stakeholders. Selain itu dalam melakukan pengungkapan pasti membutuhkan biaya dan semakin besar aset perusahaan akan membuat perusahaan lebih leluasa melakukan pengungkapan.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah:

H6 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *Triple Bottom Line*

2.6.7 Jenis Industri Terhadap Pengungkapan *Triple Bottom Line*

Perusahaan pada jenis industri yang sejenis mempengaruhi penuh kebijakan pengungkapan informasi dan informasi yang disampaikan cenderung serupa, baik isi dan pengungkapannya. Jenis industri dikategorikan berdasarkan *low profile* dan *high profile*. Perusahaan dengan kategori *high profile* berusaha memberikan pengungkapan informasi yang cenderung lebih luas. Hal ini dilakukan perusahaan untuk melegitimasi kegiatan usahanya agar mengurangi tekanan dari masyarakat. Senada dengan pernyataan tersebut Anggraini (2006) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa jenis industri berpengaruh terhadap pengungkapan *triple bottom line*. Berdasarkan penelitian diatas maka hipotesis untuk menguji penelitian ini adalah:

H7: Perusahaan dengan jenis industri berkategori *high profile* berpengaruh terhadap pengungkapan *Triple Bottom Line*